

Propaganda Budaya sebagai *Moral warfare*: Musik Populer dan Resistensi Etik di Era Peperangan Asimetris

Muhammad Ridwan Al Fauzi¹, Mula Akmal², Fauzia Gustarina Cempaka Timur³, Pujo Widodo⁴

¹ Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia (Email: aridstrike998@gmail.com)

² Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

³ Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

⁴ Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

ABSTRACT

Entering the era of asymmetric warfare signifies that power is no longer confined to military capability but to the construction of moral legitimacy and cultural narratives. This transformation defines moral warfare, a conflict fought through values, ethics, and symbols that shape public consciousness. This research examines how cultural propaganda, particularly popular music, functions as an instrument of moral warfare and ethical resistance to ideological hegemony. Using integrative qualitative analysis of literature (2020–2025) on war ethics, soft power, and cultural hegemony, the study reveals that popular music influences collective moral awareness through artistic representation, lyrics addressing social issues, and digital dissemination. As a form of counter-hegemonic moral discourse, music integrates ethical, aesthetic, and communicative dimensions, enabling cultural transformation and serving as a non-military defence strategy based on moral persuasion and shared human values.

Keywords: Cultural Propaganda, Ethical Resistance, Moral warfare, Popular Music, Soft Power

ABSTRAK

Memasuki era *asymmetric warfare* menunjukkan bahwa kekuatan tidak lagi diukur dari aspek militer, melainkan dari kemampuan membangun legitimasi moral dan narasi budaya. Pergeseran ini melahirkan konsep *moral warfare*, strategi untuk memengaruhi kesadaran publik melalui nilai, etika, dan simbol budaya. Penelitian ini menelaah bagaimana cultural propaganda, khususnya melalui musik populer, berfungsi sebagai instrumen moral warfare dan bentuk perlawanan etis terhadap hegemoni ideologis. Berdasarkan kajian kualitatif integratif atas literatur 2020–2025 tentang etika perang, *soft power*, dan *cultural hegemony*, ditemukan bahwa musik populer mampu membangun kesadaran moral kolektif melalui representasi artistik, lirik sosial, dan distribusi digital. Musik juga berperan sebagai praktik kontra-hegemonik yang menantang dominasi nilai dan struktur kekuasaan dengan ekspresi etis dan emosional. Dengan demikian, moral warfare dapat dipahami sebagai mekanisme pertahanan non-militer berbasis persuasi moral dan nilai kemanusiaan, yang mendorong

transformasi budaya serta perubahan sosial melalui kesadaran kolektif..

Kata Kunci: *Cultural Propaganda, Ethical Resistance, Moral warfare, Musik Populer, Soft Power*

PENDAHULUAN

Perhelatan Dinamika perkembangan bentuk konflik di era kontemporer sudah meninggalkan kekuatan senjata konvensional. Perihal ini ditandai dengan isu kemampuan negara atau non negara untuk membangun persepsi moral dan kesadaran kolektif sebagai kekuatan. Pernyataan ini sejalan dengan pergeseran dari *hard power* menuju *soft power* yang berfokus pada peran domain budaya, informasi dan nilai sebagai arena peperangan baru untuk mencapai legitimasi kekuasaan (Nye, 2019; 2006). Studi lain menggambarkan fenomena ini sebagai *hybridization of modern wars* atau bentuk peperangan dengan gabungan antara teknologi, ideologi dan moralitas dalam kerangka sosial politik (Akbarov, 2025). Dalam situasi ini *moral warfare* akan hadir sebagai bentuk paradigma utama dalam memahami pertarungan nilai melalui simbol, media dan budaya populer di masyarakat.

Situasi dinamika dari *moral warfare* sendiri tidak berdiri tanpa evolusi hubungan antara etika, kekuasaan dan legitimasi politik yang ada. Kerangka teoritis *just war* melalui konsep *just post bellum* memfokuskan diri pada elaborasi perang yang terjadi akan sah bukan hanya dari sudut pandang politis saja, perlu dasar moral yang menyertai (Baleng, 2025; Iverson, 2021). Seiring berjalannya waktu moralitas perang sudah melampaui bentuk kekerasan fisik, tetapi meluas menuju ranah komunikasi, representasi dan konstruksi makna. Studi yang dilakukan oleh Chernyak dan Ivleva (2024) memberikan bukti empiris bahwa konflik saat ini lebih bersifat reflektif dimana pertarungan tentang siapa yang memiliki hak moral untuk menuliskan kebenaran dan keadilan itu sendiri. Sehingga

moral warfare itu sendiri meluaskan maknanya sebagai bentuk sistematis merebut otoritas etis dalam ruang sosial media dan budaya.

Peran propaganda budaya yang menjadi instrumen utama dari praktik *moral warfare* itu sendiri. Hal ini dibenarkan melalui studi Chernobrov (2025) bahwa *participatory propaganda* di era yang memanfaatkan ruang digital sudah melebihi dari reproduksi disinformasi, tetapi turut berperan dalam rekonstruksi legitimasi moral dengan partisipasi publik dalam diskursus konflik. Melalui kerangka tersebut menjadikan musik populer dan media sebagai arena ekspresi dan perlawanan moral. Ender et al. (2020) dan Shields (2020) turut melakukan eksplorasi terhadap hubungan antara militer, masyarakat dan budaya populer yang menunjukkan bahwa nilai patriotik, solidaritas hingga kritik terhadap kekuasaan direpresentasikan melalui produk budaya film, lagu dan seni pertunjukan kepada masyarakat. Sehingga *moral warfare* dalam dimensi ini dapat dipahami sebagai praktik sosial yang merundingkan batas antara etika publik dan ekspresi etis masyarakat.

Musik populer perlu dipahami pula sebagai bentuk kegiatan komunikasi yang paling dinamis. Kombinasi antara suara dan citra budaya memberikan ruang membangun pesan moral dengan emosional (Vernalls et al., 2013). Pendapat lain menyebutkan propaganda budaya memerankan sebagai praktik menjual moralitas yang dikemas dalam estetika hiburan (Snow, 2002). Kedua pandangan ini menguatkan bahwa musik populer sedemikian rupa mengemas moralitas dengan cara estetika khas dunia hiburan. Musik populer yang mengambil peranan politik secara khusus memberikan penegasan

terhadap posisi moral terhadap kekuasaan. Situasi ini memunculkan bentuk resistensi etis sebagai tindakan simbolik untuk menentang nilai dominan yang dianggap tidak memberikan ruang keadilan melalui pemanfaatan domain budaya. Pemanfaatan ini dilakukan karena dapat diakses publik secara luas. Sehingga *moral warfare* dalam konteks ini dapat dilakukan tanpa memerlukan senjata, hanya menggunakan nilai, pesan dan narasi yang menggerakkan kesadaran moral masyarakat.

Studi ini bergerak dari asumsi bahwa *moral warfare* adalah dalam era peperangan asimetris adalah bentuk pertahanan kultural untuk menjaga nilai dan legitimasi moral bangsa. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015) melalui Buku Putih Pertahanan memberikan penguatan bahwa pertahanan modern tidak berfokus pada kekuatan militer, tetapi melibatkan pembentukan karakter, moral dan kesadaran ideologi. Perihal ini sejalan dengan pandangan Green (2025) bahwa melalui kontrak sosial sebagai fondasi dalam mencegah konflik dan kekuatan moralitas sebagai pertahanan pertama melawan disintegrasi. Melalui kolaborasi dengan konsepsi teoritik soft power (Melissen, 2005; Nye, 2006), etika perang Baleng (2025), dan studi budaya populer (Ender et al., 2020; Vernalls et al., 2013) naskah ini berupaya memberikan gambaran mengenai propaganda budaya mengambil peranan sebagai arena *moral warfare* yang menggabungkan dimensi etika, estetika dan pertahanan terhadap nilai.

Sehingga naskah ini tidak hanya berfokus pada aspek ideologis dan propaganda budaya, tetapi pada dimensi moral yang melekat. Fokus utama akan berada pada elaborasi bagaimana nilai etika diwujudkan secara etis dalam praktik komunikasi budaya khususnya melalui musik populer. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan analisa yang menjelaskan dinamika kesadaran moral yang muncul akibat hubungan antara pesan budaya, simbol politik dan identitas kolektif. Sintesa literatur dan pendekatan kualitatif integratif akan membantu elaborasi terhadap pemahaman mengenai *moral warfare* sebagai

salah satu strategi pertahanan non militer berbasis nilai dan budaya yang relevan dengan perkembangan kajian peperangan asimetris saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi *moral warfare* hadir dari kesadaran bahwa konflik sudah tidak lagi pertarungan fisik, tetapi memainkan peran dari moral dan simbolik (Twiss et al., 2024). Dalam konteks peperangan asimetris meyakini bahwa keunggulan tidak hanya dilihat dari kemampuan militer tetapi turut memperhitungkan kemampuan mempertahankan nilai moral yang menjadi dasar legitimasi (Mello, 2016). Studi yang dilakukan oleh Baleng (2025) memberikan reinterpretasi dalam *just war theory* bahwa moralitas perang saat ini lebih berfokus pada tujuan etis daripada hasil secara militeristik.

Ketiga konsepsi ini dapat menegaskan bahwa integritas moral dalam *moral warfare* adalah segala upaya etis yang dilakukan demi mempertahankan tatanan sosial yang adil sebagai dasar legitimasi.

Elaborasi ini dikuatkan dengan konsepsi kontrak sosial pertahanan yang melihat bahwa perdamaian adalah hasil ketirikatan nilai dalam masyarakat (Green, 2025a). Nilai moral yang melemah akan memudahkan terjadinya situasi perang karena luntarnya kepercayaan kolektif pada tatanan sosial yang adil. Sehingga *moral warfare* dapat dilihat sebagai strategi penggunaan kekuatan etika publik untuk menjaga stabilitas sosial yang dibutuhkan.

Melalui kerangka ini dapat dipahami bahwa moralitas adalah instrument utama melalui narasi, simbol dan sifat persuasifnya untuk penguatan makna kebenaran (Chernyak dan Ivleva, 2024).

Sorotan terhadap dilema etika dalam peperangan modern yang kompleks terjadi seiring dengan munculnya domain teknologi informasi dan arena perang siber (Schulzke, 2016). Kekerasan yang terjadi mulai memasuki dunia digital dan membuat pembenaran moralitas semakin bias (Allhoff, 2017). Kedua konsepsi ini menuntut *moral*

warfare untuk tidak membahas etika pada situasi peperangan saja, tetapi perlu meliputi kemampuan untuk reinterpretasi legitimasi moral yang menggunakan informasi sebagai senjata strategis. Perihal ini yang menjadikan konsepsi *moral warfare* beririsan dengan *ethics of influence operation* yang berfokus pada tanggung jawab moral pada setiap bentuk operasi komunikasi strategis (Skerker, 2023).

1. *Soft Power dan Propaganda Budaya*

Kerangka teoritik *soft power* dielaborasi oleh Nye (2019; 2006) sebagai dasar memahami dimensi kultural *moral warfare*. *Hard power* disebut sebagai domain yang berjalan dengan adanya unsur paksaan, sedangkan *soft power* bekerja melalui domain yang erat kaitannya dengan unsur nilai, ide dan budaya (Nye, 2019). Salah satu contoh praktiknya terjadi pada diplomasi publik berdasarkan budaya merupakan bentuk baru dari politik nilai yang menempatkan citra dan moralitas diproduksi melalui instrumen komunikasi, seni dan gaya hidup (Melissen, 2005). Sehingga dalam konteks pertahanan propaganda budaya menjalankan fungsi ganda sebagai alat legitimasi kekuasaan melalui *soft power* dan media pertahanan identitas tertentu.

Propaganda budaya diyakini pula sebagai kemasan moralitas dalam bentuk hiburan atau estetika (Snow, 2002). Bentuk ini merupakan akibat dari keterlibatan dunia digitalisasi yang memainkan peran *participatory propaganda* sehingga dorongan keterlibatan publik untuk memproduksi dan validasi terhadap pesan moral yang disampaikan (Chernobrov, 2025). Kedua konsepsi ini berusaha memberikan gambaran bahwa propaganda budaya dihasilkan dari interaksi yang terjadi di masyarakat untuk menegosiasikan nilai bersama yang ingin dihadirkan. Relevansi dengan situasi Indonesia dapat terlihat melalui studi yang dilakukan oleh Tulus dan Yuania (2023) bahwa *soft power* yang Indonesia tunjukkan melalui diplomasi budaya dengan pendekatan etis memberikan penegasan kekuatan moral dalam komunikasi lintas budaya adalah modal

utama untuk berperan dalam stabilitas regional dan global.

Secara spesifik budaya populer termasuk didalamnya musik dan film menjadi saluran penting membangun solidaritas moral dan identitas nasional (Ender et al., 2020). Musik diyakini membawa pesan keadilan, kemanusiaan dan anti kekerasan sebagai ekspresi *soft power* yang dapat mengubah persepsi khalayak tentang nilai suatu bangsa (Shields, 2020). Sehingga bentuk propaganda budaya yang dibawa oleh *moral warfare* merupakan sebuah instrumen pembentuk nilai dan kesadaran yang etis dalam masyarakat. Nilai yang dibawa dalam musik dan film dengan perlahan mereproduksi persepsi hingga membangun solidaritas tertentu sebagai kesadaran etis alami.

2. *Etika, Moralitas dan Resistensi Etis*

Etika dalam literatur filsafat politik diyakini sebagai tatanan sistematis untuk mengarahkan tindakan manusia (Chernyak dan Ivleva, 2024). Sedangkan, moralitas diyakini sebagai praktik nyata menjalankan nilai etika dalam kehidupan sosial (Du Toit, 2018). Kedua hal yang berbeda ini menjadi bagian penting dalam memahami fenomena resistensi etis sebagai bentuk tindakan moral yang muncul akibat kesadaran pada ketidakadilan dan dorongan menegakkan nilai etika yang seharusnya terjadi. Terlebih dalam perdamaian politis memerlukan keberanian moral untuk saling mengakui nilai kemanusiaan yang perlu diterapkan (Firchow, 2020). Sehingga dalam meyakini praktik resistensi etis sebagai tindakan moral yang dilingkupi dengan keberanian untuk memperjuangkan nilai etika.

Studi *morality of violence* sudah menunjukkan eksplorasinya dalam penggunaan kekerasan untuk konteks pembenaran etis membutuhkan legitimasi moral yang kuat agar tidak menjadi tindakan represif (Langfred dan Ryan, 2025). Sehingga untuk memahami resistensi etis bukan sebagai tindakan penolakan terhadap kekuasaan semata, melainkan tindakan mengembalikan keseimbangan nilai di tengah disparitas nilai.

Legitimasi moral dalam menjalankan praktik resistensi etis perlu menjaga koridor moralitas demi keseimbangan nilai yang diyakini. Nilai tersebut dapat terwujud melalui bentuk komunikasi moral dalam hal ini musik populer untuk menentang struktur hegemoni yang terwujud dalam bahasa simbolis dan emosional (Vernalls et al., 2013).

Resistensi etis juga muncul dari konsepsi hegemoni budaya yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci. Kemunculan ini berawal dari cara memandang budaya yang ada saat ini merupakan hasil perjuangan nilai-nilai ideologis oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan dengan kontrol moral dan intelektual (Hoare dan Nowell, 1999). Sehingga segala resistensi etis yang terjadi adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi terhadap kontrol moral yang terjadi. Perihal ini terjadi dalam tatanan *moral warfare* yang dilihat sebagai perlawanan terhadap nilai hegemoni yang dipaksakan dengan memanfaatkan moralitas untuk membebaskannya (Hoare dan Nowell, 1999). Arena *moral warfare* menjadikan resistensi etis sebagai dasar tindakan yang dilakukan dalam bentuk perlawanan terhadap hegemoni budaya.

3. Moral Warfare dan Pertahanan Kultural

Pertahanan kultural di Indonesia telah dikonsepsikan dalam Buku putih Pertahanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Dalam buku ini memberikan penegasan pada kepentingan nilai, etika dan identitas untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pertahanan kultural dipandang bukan hanya warisan budaya leluhur, namun bentuk menguatkan kesadaran moral masyarakat sebagai pertahanan pertama menyikapi ancaman non militer (Priyanto, et al, 2024). Sehingga pertahanan kultural bukan sebuah bahasan baru di Indonesia, namun perlu pengembangan dalam menyikapi secara nyata. Situasi ini juga dikuatkan dengan konsepsi *social contract of defence* bahwa kepercayaan masyarakat terhadap negara merupakan hasil konsistensi penerapan moralitas dan etis dalam menjalankan kepemimpinan (Green, 2025a).

Moral warfare secara global diyakini sebagai evolusi dari pertahanan secara kultural yang menempatkan nilai, narasi dan simbol sebagai instrumen strategis membentuk legitimasi dan identitas kolektif (Twiss et al., 2024). Bentuk pertahanan kultural ini dapat menjadi kekuatan tambahan bagi pertahanan konvensional untuk menghadapi bentuk ancaman hibrida. Ini telah dielaborasikan oleh Akbarov (2025) bahwa untuk menghadapi perang hibrida keberhasilannya akan bergantung pada kolaborasi pertahanan militer dengan bentuk pertahanan yang mengedepankan persuasi moral dan diplomasi budaya. Sehingga titik temu antara strategi pertahanan, komunikasi publik dan filsafat etika terjadi pada domain *moral warfare* yang dapat digunakan menghadapi ancaman peperangan asimetris.

4. Kerangka Konseptual

Sintesa literatur yang telah dielaborasikan membuat *moral warfare* dapat dipahami sebagai bentuk peperangan non fisik yang bekerja dalam domain nilai dan simbol dengan menggabungkan elemen etika perang, *soft power*, propaganda budaya, resistensi etis dan pertahanan kultural. Berikut merupakan model konseptual dari *moral warfare*.



Gambar 1. Model Konseptual *Moral Warfare*
Sumber: Diolah peneliti, 2025

Moral warfare sebagai arena pertarungan legitimasi moral pada individu, masyarakat dan negara. Membutuhkan keseimbangan antara nilai, prinsip etika dan integritas moral untuk menempatkannya sebagai pusat kekuatan strategis. *Soft power* dan propaganda

merupakan sarana menyebarkan nilai dan legitimasi moral yang dikehendaki (Chernobrov, 2025; Nye, 2006). Etika perang menjadi dasar normatif untuk menentukan legitimasi moral dari tindakan strategis yang digunakan (Baleng, 2025; Iverson, 2021). Sedangkan resistensi etis menjadi sarana praktik moral untuk melawan hegemoni nilai dominan melalui saluran ekspresi budaya (Antonio Gramsci dalam Hoare dan Nowell, 1999; Vernalls et al., 2013). Pertahanan kultural sebagai manifestasi *moral warfare* dalam konteks strategi pertahanan nasional dan ideologis (Green, 2025a; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif integratif yang memfokuskan diri pada sintesis literatur dan analisis konseptual dalam identifikasi hubungan propaganda budaya, *moral warfare* dan resistensi etis pada konteks peperangan asimetris. Melalui pendekatan ini memfasilitasi penggabungan berbagai perspektif teoritis, filosofis dan empiris dari beberapa disiplin ilmu seperti studi etika perang, komunikasi strategis dan pertahanan budaya. Penelitian ini bersifat interpretatif terhadap makna yang muncul antara teks, konteks dan nilai sosial (Creswell dan Creswell, 2023). Sifat integratif digunakan untuk tujuan rekonstruksi pemahaman melalui penggabungan ide dan temuan daya yang tersebar dari berbagai literatur (Torraco, 2016). Pemilihan pendekatan integratif ini menyesuaikan dengan karakteristik fenomena *moral warfare* yang bekerja lintas domain etika, budaya dan strategi pertahanan. Metode ini menggunakan tahapan sistematis mulai dari identifikasi, evaluasi, sintesis dan interpretasi literatur yang didapatkan (Whittemore dan Knafl, 2005). Melalui cara ini studi penelusuran tentang gagasan moral, etika dan ekspresi budaya dapat dibentuk menjadi komposisi pertahanan non militer saat ini.

Sumber data yang digunakan berupa muatan substansi literatur ilmiah yang kontemporer dan klasik berupa artikel jurnal ilmiah, referensi akademik serta dokumen kebijakan

nasional yang memuat tema tertentu. Tema besar yang digunakan adalah etika, *moral warfare*, *soft power*, propaganda budaya, hegemoni budaya, resistensi etis dan pertahanan kultural. Pemilihan literatur mempertimbangkan relevansi secara tema, keterbaruan informasi dan kedalaman analisis. Kualitas penelitian berbasis tinjauan literatur akan bergantung pada kemampuan menemukan hubungan teoritis dengan fenomena yang ada secara argumentatif (Snyder, 2019). Sehingga penggunaan literatur klasik tetap digunakan untuk memberikan koridor teoritis dan literatur akademik dalam rentang 2020 hingga 2025 sebagai pijakan untuk memahami relevansi *moral warfare* di era kontemporer.

Analisa yang dilakukan melalui empat tahapan yang diadaptasi dari model integratif Whittemore dan Knafl (2005) sebagai berikut:

- Identifikasi konseptual yang dilakukan dengan mempelajari setiap sumber untuk identifikasi konseptual inti *moral warfare*, *soft power*, propaganda budaya dan resistensi etis. Melalui eksplorasi ini menghasilkan kategorisasi tema besar yaitu etika, *moral warfare*, *soft power*, propaganda budaya, hegemoni budaya, resistensi etis dan pertahanan kultural.
- Evaluasi setiap literatur untuk membandingkan argumentasi, asumsi filosofis dan konteks sosial yang mendasarinya. Perihal ini dilakukan agar studi yang dilakukan bersifat reflektif dan melepaskan diri dari komparasi semata (Booth et al., 2016).
- Sintesis setiap konsepsi antar literatur sebagai kerangka konseptual yang dibentuk menjadi model konseptual *moral warfare*. Model ini berupaya mengolaborasikan elemen etika perang, *soft power*, propaganda budaya, resistensi etis dan pertahanan kultural (lihat model konseptual *moral warfare* pada gambar 1).
- Interpretasi literatur dilakukan untuk memberikan elaborasi hubungan antar elemen dalam konteks pertahanan asimetris. Elaborasi ini dijadikan narasi

ilmiah untuk menggambarkan *moral warfare* memainkan peran komunikasi moral dan pertahanan nilai (Torraco, 2016).

Sehingga seluruh tahapan ini memberikan koridor rekonstruksi teoritis yang ada dengan menghubungkan setiap elemen sebagai hal baru dalam konteks propaganda budaya dan moralitas publik.

Nilai validitas penelitian integratif tidak diukur melalui uji statistik, tetapi menggunakan penilaian konsistensi logis dan transparansi argumentasi yang tersedia (Creswell dan Poth, 2018). Literatur yang digunakan secara terbuka dapat dikonfirmasi melalui saluran publikasi akademik resmi dan penerbit yang kredibel. Triangulasi konsep digunakan sebagai penjaga keseimbangan antara teoritis etika, studi komunikasi dan ilmu pertahanan. Integrasi lintas disiplin ilmu menjadi kekuatan utama studi konseptual (Snyder, 2019). Tuntutan kehati-hatian untuk menjaga faktor konsistensi epistemologis sangat diperhatikan dalam studi ini. Sehingga penempatan *moral warfare* dalam studi ini bukan hanya konsep strategis, namun menjadi kerangka etik berdasarkan sintesis argumentatif dan reflektif.

Dasar penggunaan metode ini dihasilkan dari dua pertimbangan utama yaitu fenomena *moral warfare* memiliki karakteristik yang multidimensional sehingga akan sulit dijelaskan dengan pendekatan tunggal dan integrasi literatur menyediakan ruang memahami hubungan tersebut dengan dinamis. Ruang tersebut mampu memfasilitasi menangkap hubungan teoritis klasik dan modern menjadi konstruksi konseptual yang relevan dengan tantangan kontemporer (Whittemore dan Knafl, 2005). Sehingga studi ini mampu menggambarkan bagaimana nilai moral, etika dan ekspresi budaya mampu membentuk pertahanan kultural di arena perang informasi. Perihal ini menguatkan posisi *moral warfare* sebagai struktur paradigma strategis terbaru dalam studi peperangan asimetris. Dikarenakan bukan fenomena etis, tetapi usaha mempertahankan integritas moral bangsa dengan kekuatan budaya..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Moral Warfare sebagai Kerangka Acuan Pertahanan Budaya*

Konsepsi *moral warfare* semakin berkembang sejalan dengan perubahan karakteristik konflik yang sudah tidak didominasi oleh kekuatan fisik menuju perebutan legitimasi nilai dengan memanfaatkan ruang sosial. Perihal ini menjadikan moralitas sebagai landasan pertarungan mempengaruhi penilaian masyarakat tentang kebenaran, keadilan dan etis (Twiss et al., 2024). *Moral warfare* hadir sebagai bentuk respon perubahan tersebut pada arena peperangan modern. Arena ini kerap kali didominasi oleh dimensi psikologis, simbolis dan ideologis (Twiss et al., 2024). Sehingga kekuatan strategis negara tidak lagi diukur dari seberapa kuat kekuatan militer negara saja, tetapi dengan pertahanan nilai moralitas sebagai dasar legitimasi sosial yang dimiliki.

Etika perang melihat *moral warfare* dituntut menyediakan dasar normatif untuk membedakan tindakan etis dari strategi yang terkadang berbentuk manipulasi moral. Studi Baleng (2025) telah mengeksplorasi *just war theory* untuk memposisikan orientasi etis sebagai tujuan utama perang yang melebihi sebagai alat memenangkan secara politis. Studi ini melebarkan pemaknaan moralitas perang dari isu kekerasan fisik menjadi arena pertarungan legitimasi nilai yang dikonstruksikan melalui diskursus, simbol dan representasi budaya. Pertarungan moralitas ini memiliki keterkaitan dengan cara mempertahankan legitimasi publik pada tatanan sosial yang adil demi kekuatan strategi berupa integritas moral dari stabilitas nilai di masyarakat (Chernyak dan Ivleva, 2024).

Moral warfare memiliki keterkaitan dengan konsepsi kontrak sosial sebagai dasar keselarasan tatanan sosial masyarakat. Ini dibenarkan dalam studi Green (2025) bahwa perdamaian dan ketahanan sosial sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan yang dijalin masyarakat dengan negara melalui penerapan nilai moral yang konsisten dikelola. Melemahnya nilai moral, legitimasi atas

kekuasaan dan stabilitas sosial akan saling berkaitan menurut studi tersebut. Dengan demikian *moral warfare* diperlukan untuk mempertahankan tatanan nilai kolektif melalui narasi, simbol maupun komunikasi etis agar saling menguatkan. Langkah ini menempatkan moralitas sebagai alat pertahanan terhadap nilai demi menjaga integritas sosial dari pengaruh yang bersifat destrutif.

Secara strategis *moral warfare* semakin mengambil peranan penting dalam era digitalisasi. Moralitas dapat diproduksi, diperdebatkan dan disebar melalui saluran digital sehingga ruang publik menjadi arena baru memperebutka legitimasi moral. Studi yang dilakukan oleh Schulzke (2016) dan Lucas (2017) memberikan elaborasi bahwa perkembangan teknologi dan perang siber menghadirkan dilema moral yang menjadikan batas persuasif etis dan manipulatif semakin bias. Perihal ini menuntut *moral warfare* memberikan ruang untuk pertanggungjawaban terhadap cara informasi digunakan untuk rekonstruksi opini publik. *Moral warfare* sebagai kerangka acuan strategis yang memosisikan pertahanan terhadap nilai sebagai kekuatan utama untuk menghadapi peperangan asimetris.

2. *Soft Power dan Propaganda Budaya dalam Membentuk Kesadaran Moral*

Soft Power yang memiliki peranan dalam instrumen strategis untuk mengonstruksikan persepsi dan kesadaran moralitas tanpa paksaan (Nye, 2006). Perihal ini dieksplorasi kembali bahwa *soft power* berjalan melalui daya tarik nilai, budaya dan kebijakan yang dianggap memiliki legitimasi etis (Nye, 2019). Kedua hal ini dapat disintesa kan bahwa untuk memengaruhi suatu subjek dapat memanfaatkan keunggulan moralitas dalam representasi budaya untuk menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan sukarela. Dalam konteks pertahanan non militer perihal ini menjadi modal etis untuk membangun citra moral yang melekat pada identitas bangsa. Selain itu, perihal ini mampu

membentuk cara pandang publik mulai dari domestik hingga global.

Propaganda budaya yang dapat dipahami sebagai praktik *soft power* untuk membangun dan mempertahankan legitimasi moral. Melalui diplomasi publik berbasis budaya dapat diartikan sebagai bentuk politik nilai untuk menunjukkan identitas dan pesan moral dalam bentuk seni, tradisi maupun gaya hidup (Melissen, 2005). Propaganda budaya pula dilihat sebagai kemasan moralitas dalam bentuk hiburan dengan menyisipkan nilai etis yang estetis dan simbolik (Snow, 2002). Di era digital produksi propaganda budaya tidak hanya dikuasai oleh negara, namun partisipasi masyarakat turut serta membangun. *Participatory propaganda* telah menyediakan ruang untuk berperan aktif dalam memproduksi narasi moral yang menguatkan maupun menentang dominasi nilai yang ada (Chernobrov, 2025). Proses yang terjadi ini memunculkan arena interaksi nilai moral yang dipertaruhkan secara kolektif.

Keterkaitan *soft power* dan propaganda budaya sebagai instrumen rekonstruksi kesadaran moral terlihat di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Tulus dan Yuania (2023) memberikan penggambaran bagaimana diplomasi budaya yang dilakukan Indonesia mengedepankan pendekatan etis untuk menekankan nilai kemanusiaan, harmoni dan solidaritas. Melalui pendekatan ini citra moral Indonesia sebagai aktor yang mengedepankan nilai etika dalam hubungan antar negara menjadi sangat terlihat. Sudut pandang pertahanan perlu menjadikan langkah ini sebagai penguat identitas moral bangsa dan benteng pertahanan kultural sesuai karakter sosial Indonesia. Sehingga peranan *soft power* dan propaganda budaya memainkan fungsi sebagai mekanisme *moral warfare* secara halus dan menguatkan kesadaran publik terhadap dasar nilai yang dipertahankan.

Peranan strategis lainnya terletak pada kemampuan untuk membentuk opini dan perilaku tanpa tekanan melalui narasi dan simbol etis yang diterima tanpa paksaan. Kombinasi daya tarik budaya, narasi moral dan keterlibatan masyarakat dalam

propaganda budaya menghasilkan internalisasi nilai yang lebih menguatkan daripada dengan cara paksaan. Posisi *moral warfare* dapat memanfaatkan *soft power* untuk membangun citra moral dan menanamkan kesadaran etis dalam merespon isu sosial, politik maupun pertahanan. Dengan demikian *soft power* dan propaganda budaya dapat dijadikan elemen penting membangun dasar moral masyarakat yang kuat untuk menghadapi tantangan ideologis di arena peperangan asimetris.

3. Resistensi Etis sebagai Praktik Moral Warfare Melalui Budaya Populer

Kehadiran resistensi etis dapat dipahami sebagai reaksi moral terhadap penolakan nilai, kebijakan ataupun struktur kekuasaan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip etika publik. Dalam filsafat moral, etika berperan sebagai panduan normatif perilaku manusia, sedangkan moralitas merupakan praktik menjalankan nilai etika dalam kehidupan sosial (Chernyak dan Ivleva, 2024; Du Toit, 2018). Perbedaan antara tatanan sosial yang berlaku dengan nilai etika yang diyakini akan memunculkan resistensi etis untuk mengembalikan keseimbangan nilai. Keberanian secara moral untuk mengakui dan mempertahankan nilai kemanusiaan adalah kunci terciptanya perdamaian yang berkelanjutan (Firchow, 2020). Sehingga memahami resistensi etis bukan sebagai perlawanan saja, tetapi tindakan atas dasar moralitas yang dilandasi kesadaran akan nilai tertentu.

Resistensi etis erat kaitannya dengan permasalahan legitimasi menggunakan kekuatan. Studi yang dilakukan Langfred dan Ryan (2025) tentang *morality of violence* memberikan pemahaman terkait penggunaan kekerasan hanya dibenarkan secara etis apabila memiliki landasan moral yang kuat dan demi keadilan. Sudut pandang ini dapat menunjukkan bahwa *resistensi etis* sangat memerlukan argumentasi terhadap nilai. Dalam budaya populer, resistensi etis dapat diwujudkan melalui komunikasi moral melalui musik ataupun ekspresi budaya

lainnya. Kombinasi suara, lirik dan citra yang divisualisasikan dalam musik populer menambah kekuatan simbolik dan emosional yang efektif dalam menyampaikan pesan moral (Vernalls et al., 2013). Sehingga dapat disintesis bahwa budaya populer berperan sebagai medium bernilai strategis dalam *moral warfare* karena kemampuan memengaruhi publik secara emosional dan kesadaran akan nilai.

Kerangka pemikiran Antonio Gramsci menguatkan landasan teoritis resistensi etis dengan hegemoni budaya. Argumentasi budaya yang dianggap sebagai sebuah keadaan normal adalah hasil dominasi ideologis dari kelompok dominan sebagai alat pemelihara moral dan intelektual (Hoare dan Nowell, 1999). Sehingga resistensi etis dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi tersebut untuk membebaskan masyarakat dari hegemoni budaya yang mengatur. Sudut pandang *moral warfare* dapat menyebutkan bahwa budaya populer adalah arena pertarungan makna dan legitimasi moral yang menjadikan pesan budaya sebagai alat menggeser dominasi nilai yang dipandang tidak adil. Musik, film dan karya seni dapat disebut sebagai wadah mengkritik struktur kekuasaan dan menghadirkan pilihan nilai etis yang mungkin dapat diterima secara umum. Salah satu praktiknya dalam budaya populer adalah fenomena grup band *Rage Against The Machine* (RATM) yang secara global dikenal telah memanfaatkan musik sebagai saluran kritik sosial dan ideologis. RATM hadir untuk menunjukkan bagaimana musik dapat digunakan sebagai alat *counter hegemony* dengan membawa isu ketidakadilan sosial, dominasi politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Lirik, simbol visual dan gaya musikalitas yang konfrontatif telah dipadukan oleh RATM dari unsur etika, ekspresi budaya maupun narasi moralitas untuk melawan isu struktural. Contoh ini merupakan bentuk musik populer yang difungsikan sebagai praktik *moral warfare* untuk melawan legitimasi moral kekuasaan dengan resistensi etis.

4. *Moral Warfare sebagai Pertahanan Kultural Dalam Peperangan Asimetris*

Posisi strategis dari pertahanan kultural berada pada domain identitas, nilai dan karakter bangsa di tengah dinamika ancaman non militer (Waluyo, et al., 2020). Indonesia melalui Buku Putih Pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015) telah menyatakan sikap bahwa pertahanan yang dijalankan tidak hanya bersifat fisik dan militeristik saja, tetapi membutuhkan pembentukan karakter, moral dan kesadaran ideologis masyarakat sebagai garda terdepan. Melalui kerangka tersebut *moral warfare* akan berfungsi sebagai rangkaian mekanisme pertahanan kultural dengan nilai etika sebagai inti ketahanan nasional. Studi yang dilakukan oleh Green (2025) menegaskan gagasan tersebut melalui konsepsi kontrak sosial yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat berawal dari penerapan secara konsisten akan nilai moral dalam tata kelola negara. Melemahnya nilai moral akan mengikis kepercayaan dan memunculkan ruang kerentanan akan pengaruh nilai yang tidak diharapkan.

Perihal ini semakin relevan dengan konteks peperangan asimetris yang didalamnya terdapat peran operasi informasi, manipulasi narasi dan campur tangan budaya. Sebagai sebuah evolusi dari strategi pertahanan *moral warfare* sangat fokus pada perebutan legitimasi moral dan identitas kolektif (Twiss et al., 2024). Langkah ini berfungsi pada penyebaran nilai, simbol dan narasi moral untuk membangun kesadaran publik dan penguatan daya tahan ideologis. *Moral warfare* dapat berperan serta dalam skema pertahanan modern melalui nilai etika publik, narasi kebangsaan dan legitimasi moral untuk menangkal nilai asing yang bertentangan dengan jati diri nasional.

Dalam konteks ancaman hibrida yang menggabungkan dimensi militer, politik, informasi, dan budaya, *moral warfare* menjadi pelengkap strategis bagi pertahanan konvensional. Akbarov (2025) menegaskan bahwa keberhasilan menghadapi perang

hibrida ditentukan oleh kemampuan negara mengombinasikan kekuatan militer dengan strategi berbasis persuasi moral dan diplomasi budaya. Strategi ini memadukan aspek kognitif (kesadaran), afektif (emosi moral), dan normatif (nilai) untuk membangun ketahanan kultural.

Dengan demikian, *moral warfare* bukan sekadar reaksi taktis, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat konsensus nilai, menjaga legitimasi moral negara, dan membangun kohesi sosial dalam menghadapi ancaman asimetris yang bersifat ideologis dan naratif.

Peran *moral warfare* dalam pertahanan kultural juga mencakup proses internalisasi nilai yang dilakukan melalui pendidikan, komunikasi publik, dan ekspresi budaya. Ketika nilai moral terintegrasi ke dalam praktik sosial dan budaya, masyarakat menjadi lebih resisten terhadap pengaruh negatif yang bertentangan dengan identitas bangsa. *Moral warfare* memperkuat ruang kultural sebagai arena pembentukan karakter dan ketangguhan nilai, bukan hanya sebagai simbol tradisi. Dengan memperkuat moralitas publik dan kesadaran etis, *moral warfare* menciptakan fondasi pertahanan kultural yang kokoh, adaptif, dan relevan dengan tantangan era peperangan asimetris.

KESIMPULAN

Studi ini memberikan elaborasi bahwa *moral warfare* berperan sebagai model strategi yang inovatif dalam penanganan konflik asimetris. Ini didasari bahwa peperangan sudah tidak menggantungkan kekuatan fisik saja, tetapi melakukan pembenaran moral, prinsip dan pemahaman secara luas. Perubahan *hard power* menuju *soft power* dengan memperlihatkan dominasi saat ini akan berkaitan dengan kemampuan mengonstruksikan nilai etis dan simbolis yang diyakini oleh publik. *Moral warfare* bertindak sebagai instrumen pertahanan non militer dengan pemanfaatan persuasif etis, interaksi budaya dan manifestasi moralitas demi keseimbangan sosial sebuah bangsa.

Ringkasan literatur memberikan penggambaran bahwa propaganda budaya

dapat menjadi alat utama dalam pelaksanaan *moral warfare*. Melalui media massa musik, film dan seni pertunjukan dengan membawa nilai etika dapat memikat publik untuk membangun pemahaman moral bersama. Musik populer secara khusus memfasilitasi perlawanan etis secara simbolik terhadap dominasi hegemoni secara simbolik dan pesan moral. Praktik ini memberikan kemungkinan bahwa domain budaya mampu menyediakan sarana pertahanan kultural untuk menguatkan integritas moral masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarov, M. (2025). The Impact of “Soft Power” Means on the Hybridization of Modern Wars. *Metafizika Journal*, 8(1), 54–73. <https://doi.org/10.33864/2617-751x.2025.v8.i1.54-73>
- Allhoff, F. (2017). Ethics and Cyber Warfare: The Quest for Responsible Security in the Age of Digital Warfare, by George Lucas. In *Journal of Military Ethics* (Vol. 16, Issues 1–2). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1080/15027570.2017.1352256>
- Baleng, G. T. (2025). Just war theory and scapegoat mechanism: An analysis of *missio Dei* and social order. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 81(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.10262>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. SAGE Publications.
- Chernobrov, D. (2025). Participatory propaganda and the intentional (re)production of disinformation around international conflict. *Critical Studies in Media Communication*, 42(1), 101–106. <https://doi.org/10.1080/15295036.2025.2467433>
- Chernyak, A. Z., & Ivleva, M. L. (2024). The Ethics of Conflict in Changing World. *RUDN Journal of Philosophy*, 28(3), 872–884. <https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-3-872-884>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publication.
- Du Toit, F. (2018). When political transitions work: Reconciliation as interdependence. In *When Political Transitions Work: Reconciliation as Interdependence*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa065>
- Ender, M. G., Reed, B. J., & Absalon, J. P. (2020). Popular Culture and the Military. In *Handbook of Military Sciences* (pp. 1–19). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02866-4_36-1
- Firchow, P. (2020). When political transitions work: reconciliation as interdependence. *International Affairs*, 96(3), 807–809. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa065>
- Green, S. D. (2025a). On the social contract as key to preventing wars: A revised perspective of conflict management. In *International Relations Theory and Philosophical Political Insights Into Conflict Management* (pp. 231–259). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9626-1.ch010>
- Green, S. D. (2025b). On the Social Contract as Key to Preventing Wars (pp. 231–260). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9626-1.ch010>
- Hoare, Q., & Nowell, G. (Eds.). (1999). *Prison Notebooks of Antonio Gramsci* (Q. Hoare & G. Nowell, trans.). Lawrence & Wishart.
- Iverson, J. (2021). *Jus Post Bellum*. In *Leiden Studies on the Frontiers of International Law* (Vol. 8). Brill Nijhoff. <https://doi.org/10.51644/9780889206595-010>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Langfred, C., & Ryan, K. E. (2025). The morality of violence: the legitimate use of

- violence as a conflict resolution strategy. *International Journal of Conflict Management*.
<https://doi.org/10.1108/IJCMA-10-2024-0292>
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice*. *Studies in Diplomacy and International Relations*, 3–27.
https://doi.org/10.1057/9780230554931_1
- Mello, P. A. (2016). *Asymmetric Warfare*. 4–5.
<https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeos0773>
- Nye, J. S. (2019). *Soft Power and Public Diplomacy Revisited*. *The Hague Journal of Diplomacy*.
- _____. (2006). *Soft power: the means to success in world politics*. *PublicAffairs*.
- Priyanto, P., Akbar, M., & Timur, F. G. C. (2024). *Threat Perception In Indonesia: Time Series Analysis of Defense Doctrines Between 1991-2023*. *Journal of Governance*, 9(4).
- Schulzke, M. (2016). *The Morality of Drone Warfare and the Politics of Regulation*. Palgrave Macmillan UK.
<https://books.google.co.id/books?id=P4tjDQAAQBAJ>
- Shields, P. M. (2020). *Dynamic Intersection of Military and Society*. In *Handbook of Military Sciences* (pp. 1–23). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-02866-4_31-1
- Skerker, M. (2023). *The Ethics of Military Influence Operations*. *Conatus*, 8(2), 589–612. <https://doi.org/10.12681/cjp.35113>
- Snow, N. (2002). *Propaganda, Inc: Selling America's Culture to the World*. Seven Stories Press.
- Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torraco, R. J. (2016). *Writing Integrative Literature Reviews*. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428.
<https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Tulus, D., & Yuania, S. (2023). *Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia -Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power*. *Journal of Political Issues*, 4(2), 74–88.
- Twiss, S. B., Lo, P., & Chan, B. S. B. (2024). *Warfare Ethics in Comparative Perspective*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003336372>
- Vernalls, C., Herzog, A., & Richardson, J. (2013). *Sound and Image in Digital Media*. Oxford University Press.
- Waluyo, S. D., & Timur, F. G. C. (2020). *The Implementation of Bela Negara Value in Citizenship Education in the Efforts to Prevent Radicalism*. *Research on Humanities and Social Sciences*.
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). *The integrative review: updated methodology*. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>